

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (STUDI KASUS KECAMATAN MARITENGGAE)

Muthia Fadhilah Husni¹, Abdul Jabbar², Akhmad Yasin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: muthiahusni@gmail.com

ABSTRACT

Local governments have the responsibility to manage governance and development affairs in their regions, including the agricultural sector. Regional autonomy provides freedom for local governments to regulate policies and development programs in agriculture according to the characteristics of their regions. Kabupaten Sidenreng Rappang, as a national food barn, plays a crucial role in the agricultural sector. However, data on rice production indicates a significant decline in recent years. This study identifies the implementation of policies related to the protection of agricultural land in Kabupaten Sidenreng Rappang, including the conversion of agricultural land to non-agricultural use. The research employs a qualitative method, conducting interviews to gather necessary data. There were 8 informants, including government agencies, farmer groups, and professional farmer organizations. Data analysis was performed using Nvivo 12 Plus software. The results show that sustainable agricultural land protection policies in Kabupaten Sidenreng Rappang have been implemented, as indicated by the analysis of the data showing that all four indicators of Edward III Policy Implementation Theory have been executed effectively by government agencies, farmer groups, and professional farmer organizations. Challenges faced in policy implementation include limited resources, extreme climate changes, and the level of public awareness.

Keywords: Implementation, Land Use Conversion

ABSTRAK

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, termasuk sector pertanian. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan dan program pembangunan pertanian sesuai dengan karakteristik daerahnya. Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lumbung pangan memiliki peran penting dalam sector pertanian. Namun, data produksi padi menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini mengidentifikasi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang termasuk Instansi Pemerintah, Kelompok Tani dan Organisasi Profesi Petani. Analisis yang digunakan untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan Software Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah diimplementasikan dilihat dari hasil analisis data yang memperlihatkan bahwa keempat indikator teori Implementasi Kebijakan Edward III telah dijalankan baik oleh Instansi Pemerintah, Kelompok Tani, Maupun Organisasi Profesi Tani. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini seperti kurangnya sumber daya, perubahan iklim ekstrim, dan tingkat kesadaran masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Alih Fungsi Lahan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang subur. Diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



(UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pertanian merupakan basis ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Pertanian dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya terkait penyediaan pangan dalam negeri dan ketersediaan lapangan kerja. Sektor pertanian menjadi media penyedia makanan pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Salah satu daerah pertanian dan merupakan Lumbung Pangan Nasional adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian terutama tanaman pangan yang memiliki andil besar dalam pertumbuhan perekonomian. Hamparan padi yang luas, penanaman dan penggilingan padi, hingga peredaran beras semua ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini pula yang menjadikannya sebagai daerah yang penting dalam sektor pertanian. Luas lahan sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 seluas 49.396 Ha yang terdiri atas 38.542 Ha sawah irigasi dan 10.854 Ha sawah non irigasi.

Tabel 1. Produksi Padi (Ton) Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Produksi Padi (Ton)
2016	587.938
2017	665.287
2018	536.050
2019	515.012
2020	443.799

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 tentang produksi padi, pada tahun 2016 produksi padi sebesar 587.938 ton, pada tahun 2017 sebesar 665.287 ton, pada tahun 2018 sebesar 536.050 ton, pada tahun 2019 sebesar 515.012 ton, dan pada tahun 2020 produksi padi sebesar 443.799 ton. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan menurun. Penurunan produksi padi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan penyuluhan, serta kelembagaan petani. Upaya penanganan produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dilakukan untuk peningkatan produksi padi yang berkelanjutan.

Penurunan produksi padi dan luas panen di Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan oleh beberapa faktor. Ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan salah satunya ialah alih fungsi lahan pertanian karena penerapannya berdampak pada produksi pangan, lingkungan fisik, dan tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani (Wibisono & Yeni Widowaty, 2023). Alih fungsi lahan pertanian juga menjadi penyebab sempitnya luas lahan yang diusahakan. Berikut data daftar alih fungsi lahan pertanian tahun 2020 hingga tahun 2023:

Tabel 2. Daftar Alih Fungsi Lahan Sawah

Kecamatan	Tahun				Jumlah
	2020	2021	2022	2023	
Panca Lautang	-	-	-	-	-
Tellu Limpoe	-	591	-	-	591
Watang Pulu	42.125	8.642	8.174	37.461	96.402
Baranti	-	3.342	-	-	3.342
Panca Rijang	41.419	373	257	16.522	58.571
Kulo	4.100	327	-	-	4.427
Maritengngae	20.730	37.089	60.447	-	118.266
Watang Sidenreng	-	-	600	43.924	44.524
Pitu Riawa	21.695	9.643	-	9.281	40.619
Pitu Riase	-	-	-	-	-
Dua Pitue	144	60.007	7.029	31.040	98.220
JUMLAH	130.213	120.014	76.507	138.228	464.962

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa kecamatan Maritengngae menempati posisi tertinggi angka alih fungsi lahan pertanian sebesar 118.266 Ha. Bukan angka yang kecil, hal ini memungkinkan terjadi karena beberapa hal, termasuk diantaranya kebutuhan akan lahan perumahan yang terus meningkat dikarenakan kecamatan Maritengngae merupakan Ibukota kabupaten atau termasuk kawasan perkotaan.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau secara keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan, baik secara sementara maupun permanen (Asra et al., 2020). Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian secara teoritis dapat dijelaskan dalam konteks ekonomika lahan yang menempatkan sumberdaya lahan sebagai factor produksi, dimana berkembang pandangan bahwa lahan atau tanah diperlakukan sebagai komoditas strategis (Sonet et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak. Karena itu, dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, dan permintaan akan tanah terus bertambah. Tidak seimbang antara penyediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu yang menyebabkan terjadinya relokasi penggunaan lahan.

Untuk mengantisipasi terus menurunnya lahan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka pada tahun 2015 Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan. Setelah dikeluarkannya peraturan daerah tersebut, permasalahan perubahan fungsi lahan atau dengan kata lain penurunan fungsi lahan dari pertanian (sawah) menjadi non pertanian masih terus terjadi. Persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan daerah yang berlaku, tetapi ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Persoalan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan ketidaksesuaian antara cita-cita yang dibangun dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

dengan realita yang terjadi di lapangan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (Wahab, 2004) adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Donald S. van Metter dan Carl E. Va dalam (Widodo, 2007) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.*

Menurut George C. Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, dikatakan bahwa *Implementation of the decisions of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, pembuat kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

Komunikasi

Edward III dalam (Nugroho, 2009) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”, juga berarti proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Informasi mengenai kebijakan publik harus dikomunikasikan kepada pelaku kebijakan agar mereka memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan dan mencapai tujuannya. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2007), Komunikasi kebijakan mencakup paling sedikitnya tiga indikator yaitu Transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementers) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah satu pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan.
- b. Dimensi kejelasan (clarity) menginginkan agar kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas dan mudah dipahami sehingga mereka semua mengetahui maksud, tujuan sasaran, dan substansi kebijakan tersebut dan dapat mempersiapkan serta melaksanakannya dengan baik, efektif dan efisien. Ketidajelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.
- c. Dimensi Konsistensi (consistency) merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Sumber Daya

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecapakan pelaksana kebijakan public untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif (Nugroho, 2009). Menurut Edward III yang dikutip oleh (Agustino, 2006), bahwa sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

- a. Sumberdaya Manusia. Sumberdaya manusia merupakan masalah sumberdaya memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa “probably the most essential resource in implementing policy is staff”. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh sumberdaya manusia yang tidak memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan.
- b. Sumberdaya Anggaran. Edward III dalam (Widodo, 2007), menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Menurut Edward III, kualitas pelayanan yang seharusnya ditawarkan kepada masyarakat terkendala oleh terbatasnya dana yang tersedia.

Disposisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian disposisi dari segi administrasi adalah pandangan pejabat terhadap hal-hal yang diangkat dalam surat dinas, yang diungkapkan pada surat yang bersangkutan atau pada halaman tersendiri. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2007) menekankan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Menurut (Agustino, 2006), pertimbangan-pertimbangan berikut harus membuat Edward III khawatir tentang sikap dalam memberlakukan kebijakan terdiri dari :

- a. Pengangkatan Birokrasi. Jika staf saat ini tidak menjalankan kebijakan yang diinginkan oleh otoritas yang lebih tinggi, disposisi atau sikap pelaksana justru akan menciptakan hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mereka yang berkomitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, lebih tepatnya kepentingan masyarakat harus dipilih untuk pengangkatan dan seleksi sebagai staf pelaksana kebijakan.
- b. Insentif. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, dan pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku ini dengan mengubah insentif. Meningkatkan beberapa keuntungan atau biaya dapat berfungsi sebagai motivator untuk memastikan bahwa pelaksana mengikuti instruksi surat tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memajukan tujuan pribadi atau organisasi.

Struktur Birokrasi

Edward III dalam (Widodo, 2007) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Edward III yang dikutip oleh (Hasbullah, 2021) menjelaskan bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni standard operational procedure (SOP) dan fragmentasi. Menurut Winarno, “standard operational procedure (SOP) merupakan konflik internal dapat mengakibatkan berlalunya waktu, pengeluaran sehari-hari, dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



kebutuhan akan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan berskala besar”.

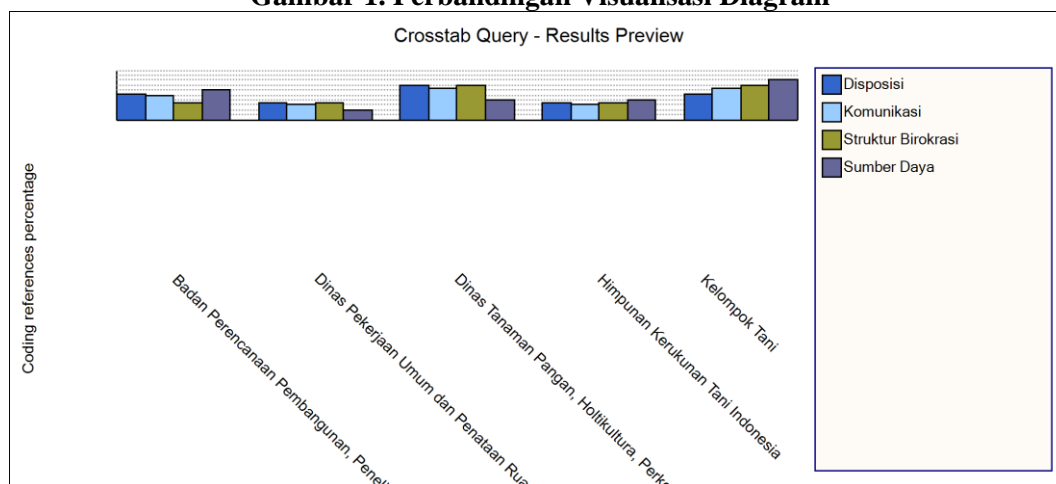
- a. Standard operational procedure (SOP). Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.
- b. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Fragmentasi menyebabkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi kebijakan.

METODE

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini penulis menggunakan jenis data primer sebagai data utama. Berdasarkan sumber perolehan, data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari tempat penelitian. Menurut (Fauzy, 2019), Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Peneliti memilih sumber yang menjadi tujuan penelitian, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun sasaran penelitian ini adalah Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Badan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, Organisasi Profesi Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kelompok tani di Kecamatan Maritengngae. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pemanfaatan aplikasi Nvivo 12 Plus.

PEMBAHASAN

Gambar 1. Perbandingan Visualisasi Diagram



Sumber: Data primer yang diolah, 2024

1. Komunikasi

Dalam teori Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Edward III menekankan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity) Menurutnya, transmisi mengacu pada cara informasi disampaikan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



kepada publik, kejelasan mengenai informasi yang disampaikan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Dengan demikian, dalam teori Edward III, komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, tidak hanya bagi implementator, tetapi juga bagi pihak-pihak terkait lainnya.

Hasil analisis dalam bentuk visualisasi diagram terkait dengan komunikasi pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menunjukkan hasil dengan jumlah presentase sebanyak 26,67%, pada Badan Perencanaan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah menunjukkan hasil 20%, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dengan jumlah presentase sebanyak 13,33%, kelompok tani di Sidenreng Rappang menunjukkan hasil dengan jumlah persentase sebanyak 26,67%, dan pada Organisasi Profesi Tani menunjukkan hasil memiliki dengan jumlah persentase 13,33%.

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menunjukkan persentase tertinggi untuk indicator diatas. Sebagai instansi pemerintah dan sebagai OPD Tekhnis yang memang berfokus dalam mengurus segala aspek pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah semestinya menjadi tugas dari Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan untuk melakukan sosialisasi secara efektif kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan konsekuensi araknya alih fungsi lahan serta dampak negatifnya terhadap produksi padi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan proaktif dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sehingga dapat dipertahankan dan ditingkatkan produktivitasnya.

2. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan George Edward III, sumber daya merupakan salah satu dari empat variabel krusial yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut teori ini, sumber daya mencakup aspek-aspek seperti jumlah staf, keahlian para pelaksana, informasi yang relevan, dan pemenuhan sumber-sumber yang diperlukan. Sumber daya dianggap sebagai sumber penggerak dan pelaksana, dan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pemanfaatan biaya dan waktu dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

Hasil analisis dalam bentuk visualisasi diagram terkait dengan komunikasi pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menunjukkan hasil dengan jumlah presentase sebanyak 16,67%, pada Badan Perencanaan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah menunjukkan hasil 25%, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dengan jumlah presentase sebanyak 8,33%, kelompok tani di Sidenreng Rappang menunjukkan hasil dengan jumlah persentase sebanyak 33,33%, dan pada Organisasi Profesi Tani menunjukkan hasil memiliki dengan jumlah persentase 16,67%.

Kelompok tani memperoleh persentase pelaksanaan tertinggi, menjadi unsur utama yang melaksanakan peraturan ini dengan sepenuhnya. Kedudukan mereka yang dominan ini mengindikasikan peran krusial dalam implementasi kebijakan tersebut. Di posisi berikutnya, Badan Perencanaan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peranan strategis dengan meraih persentase kedua yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh fungsi vitalnya sebagai lembaga penentu kebijakan alokasi anggaran, yang pada gilirannya mempengaruhi distribusi sumber daya anggaran secara keseluruhan. Dengan demikian, struktur hierarki persentase ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara kelompok tani dan Badan Perencanaan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah dalam konteks implementasi peraturan dan alokasi sumber daya.

3. Disposisi

Disposisi dalam teori implementasi kebijakan George Edward III adalah sikap dari pelaksana kebijakan yang merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



Hasil analisis dalam bentuk visualisasi diagram terkait dengan komunikasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menunjukkan hasil dengan jumlah presentase sebanyak 28,57%, pada Badan Perencanaan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah menunjukkan hasil 21%, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dengan jumlah presentase sebanyak 14,29%, kelompok tani di Sidenreng Rappang menunjukkan hasil dengan jumlah persentase sebanyak 21%, dan pada Organisasi Profesi Tani menunjukkan hasil memiliki dengan jumlah persentase 14,29%.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menunjukkan persentase tertinggi dalam pelaksanaan peraturan ini, mengingat statusnya sebagai unit teknis eksekutor yang memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan posisinya sebagai instansi pelaksana utama, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan perlu mewujudkan disposisi yang optimal untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan George Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi yang merupakan salah satu yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang kondusif dan efektif akan membantu para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.

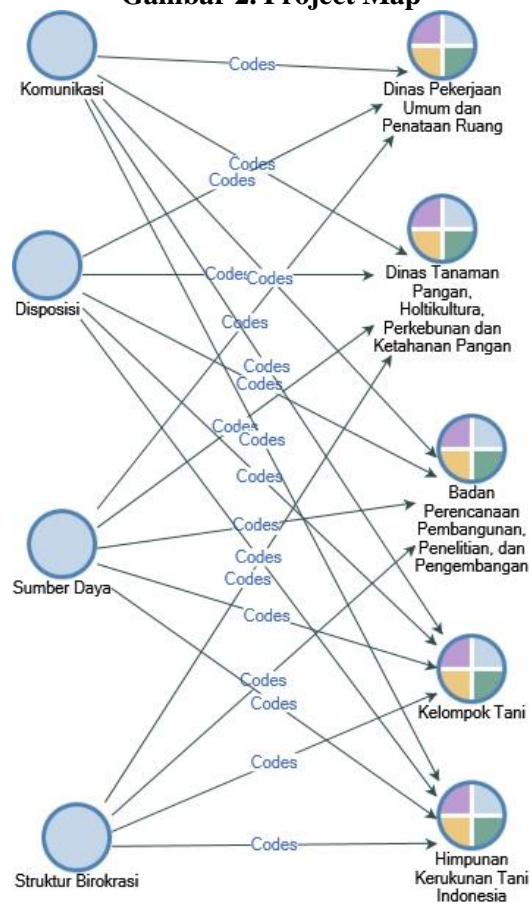
Hasil analisis dalam bentuk visualisasi diagram terkait dengan komunikasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan menunjukkan hasil dengan jumlah presentase sebanyak 28,57%, pada Badan Perencanaan Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah menunjukkan hasil 14,29%, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dengan jumlah presentase sebanyak 14,29%, kelompok tani di Sidenreng Rappang menunjukkan hasil dengan jumlah persentase sebanyak 28,57%, dan pada Organisasi Profesi Tani menunjukkan hasil memiliki dengan jumlah persentase 14,29%.

Jumlah presentase implementasi strategi pada dinas tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan memiliki presentase yang paling besar ini dikarenakan Dinas tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut. Pemahaman mengenai struktur birokrasi ini mencakup elemen-elemen seperti hierarki, pembagian tugas, dan komunikasi internal., Dinas tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan dapat memperkuat organisasinya untuk lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan peraturan, memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan, dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara berkelanjutan.

Pemerintah juga menyampaikan penurunan produktivitas pertanian pada tahun 2019-2020 terjadi karena beberapa faktor seperti serangan hama, perubahan iklim menyebabkan kemarau berkepanjangan kemudian pergantian iklim yaitu banjir otomatis terjadi perubahan-perubahan yang berakibat pada tenggelamnya lahan sawah, dampak covid 19. Dampak covid ini bukan hanya terjadi penurunan pada manusia tapi karena adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat, yang biasanya pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian bukan hanya menyebabkan masyarakat lokal tapi juga melibatkan masyarakat dari daerah sekitar. Sehingga akibat dari pembatasan kegiatan sosial masyarakat berdampak pada sektor pertanian. Solusi yang kami berikan pengendalian serangan hama dan penyakit adalah melakukan kegiatan sekolah lapang. Memberikan pengendalian mulai dari serangan hama, pestisida, benih dan pupuk. Di tahun 2022 sudah terjadi peningkatan dengan jumlah produksi sebanyak 535.316,00 ton.

Dari hasil wawancara beberapa informan dengan indikator adaptif pemerintah dapat dilihat melalui project map menggunakan Nvivo 12 di bawah ini :

Gambar 2. Project Map



Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 dapat dilihat dari analisis data yang memperlihatkan bahwa semua sumber data diatas merealisasikan Teori Edward III. Dari keempat indicator Teori Implementasi Edward III, baik dari Instansi pemerintah, kelompok tani maupun organisasi profesi petani menjalankan keempat indicator membuktikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 dapat dikatakan terimplementasi atau dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Perubahan dan Penurunan Produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terjadi adanya serangan hama penyakit dan perubahan iklim. Hal ini membuat pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi dampak kerusakan yang terjadi. Fenomena Alih Fungsi Lahan juga menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pertanian namun dalam angka yang kecil. Solusi yang diberikan pemerintah dengan lapang unuk mengatasi pengendalian hama dan penyakit. Pemerintah membuat Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan. Hasil dari pengimplementasian solusi dari pemerintah menghasilkan luas panen padi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 sebanyak 89.434 Ha, kemudian meningkat lagi menjadi 90.653 Ha. Kabupaten Sienreng Rappang menempati urutan ke-3 luas panen tahun 2022 setelah kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo.

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang menyoroti implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang, beberapa kesimpulan dapat diambil

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



sebagai gambaran umum. Kebijakan tersebut, yang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dapat dikatakan telah dijalankan dengan baik. Analisis data menunjukkan bahwa keempat indikator teori Implementasi Kebijakan Edward III telah diimplementasikan secara memadai oleh instansi pemerintah, kelompok tani, dan organisasi profesi tani.

Meskipun demikian, penelitian juga mengungkapkan adanya sejumlah tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya sumber daya, dampak perubahan iklim, dan tingkat kesadaran masyarakat. Salah satu tantangan yang signifikan adalah tingkat kesadaran masyarakat, yang memiliki dampak langsung pada kontribusi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Meski demikian, perlu dicatat bahwa alih fungsi lahan hanya merupakan sebagian kecil dari penyebab penurunan produktivitas pertanian. Secara keseluruhan, penurunan produktivitas pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim dan serangan hama.

Ketika melihat kurangnya sumber daya sebagai kendala, perlu dicari solusi atau upaya tambahan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, perubahan iklim menjadi faktor krusial yang memerlukan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi agar lahan pertanian tetap produktif. Peningkatan kesadaran masyarakat juga perlu diintensifkan melalui edukasi dan kampanye agar partisipasi mereka dalam mendukung kebijakan dapat ditingkatkan.

Kendati demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan menangkap tantangan yang dihadapi, dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut dan memastikan ketahanan pangan di wilayah tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoella, A. Y., & Rusfiana, Y. (2015). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (A. Y. Abdoellah (ed.); Cetakan Ke). Penerbit Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan I, Issue 1). CV. Syakir Media Press.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*, 1(8), 1–19.
- Asra, R., Nurnawati, A. A., Irwan, M., & Mappiasse, M. F. (2020). Analisis Perubahan Lahan Sawah berbasis Sistem Informasi Geografis di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Galung Tropika*, 9(March), 286–297.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berk. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 3, 15–28.
- Cahyani Mokoginta, R., Syafri, S., & Jufriadi, J. (2021). Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kawasan Jalan Hertasing Baru Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 204–214. <https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.65>
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Repository.Ut.Ac.Id*, 3, 1–46. <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>
- Fauzy, A. (2019). Metode Sampling. In A. Canty (Ed.), *Molecules* (Edisi Kedu, Vol. 9, Issue 1). Universitas Terbuka. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Hasbullah. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa (Vol. 3, Issue 2).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 3 Maret 2024

- Iryana, & Kawasati, R. (2020). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. In *Ekonomi Syariah* (Vol. 21, Issue 58). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Isdiyana K. A., B. K. H. (2018). Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 2 no 2(Desember 2018), 122–130.
- Manggala, M. Z. (2019). Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan terhadap Ketahanan Pangan Beras Kota Tasikmalaya. 9–31.
- Priokta Dwisuda. (2014). Kedudukan Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 36–56. <http://repository.unpas.ac.id/29067/>
- Rupini, A., Dewi, N., & Sueca, N. (2017). Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Perkembangan Spasial Daerah Pinggiran Kota (Studi Kasus: Desa Batubulan, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 5(2), 9–18. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/article/download/405/287>
- Rusdi, Rizabuana, Manurung, R., Badaruddin, & Sismudjito. (2023). Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Batang Pane Ii Kecamatan Halongonan Timur. 2(5), 1589–1608.
- Sonet, R., Driptufany, D. M., Defwaldi, & Armi, I. (2023). Analisis Alih Fungsi Lahan Sawan Menjadi Lahan Terbangun di Kota Bukittinggi. *Crossborder*, 6(1), 548–570.
- Wibisono, G., & Yeni Widowaty. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id